

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KETAHANAN BANK DALAM MENYALURKAN DANA PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Era Yudistira

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

erayudistira03@gmail.com

Abstract

Bank resilience can be seen from the percentage of NPL / NPF in the bank. When NPL / NPF increases, it is indicated that the condition of bank resilience decreases vice versa, when NPL / NPF is low, the bank resilience condition is in good condition. When viewed from the development of conventional bank NPLs and Islamic banking NPF, sharia banks are more stable resistance than conventional banks. Especially in the event of a crisis, Islamic banks tend to be more stable than conventional banks. As happened in 2005, during the crisis due to rising world oil prices, resulting in high inflation rate, conventional bank NPLs increased drastically from 4.5% to 7.56%. While the NPF in sharia banks also increased but not very significant only from 2.37% to 2.82%.

Keywords: *NPL, NPF, bank resilience*

Abstrak

Ketahanan perbankan dapat dilihat dari persentase NPL/NPF pada bank. Ketika NPL/NPF meningkat maka diindikasikan kondisi ketahanan bank menurun begitu pun sebaliknya, ketika NPL/NPF rendah maka kondisi ketahanan bank dalam keadaan yang baik. Jika

dilihat dari perkembangan NPL bank konvensional maupun NPF bank syariah, bank syariah lebih stabil ketahanannya dibandingkan dengan bank konvensional. Terutama bila terjadinya krisis, bank syariah cenderung lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional. Seperti yang terjadi di tahun 2005, pada saat terjadi krisis akibat meningkatnya harga minyak dunia, yang mengakibatkan tingginya laju inflasi, nilai NPL bank konvensional meningkat drastis dari 4,5 % menjadi 7,56%. Sedangkan NPF pada bank syariah juga meningkat tetapi tidak terlalu signifikan hanya dari 2,37% menjadi 2,82%.

Kata Kunci: NPL, NPF, ketahanan bank

Pendahuluan

Negara memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakatnya, sesuai dengan yang ada di dalam UUD 1945. Bagaimana masyarakat mampu mencapai kesejahteraan tersebut, juga seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, yang salah satu dapat dilakukan dengan menjaga dan mengawasi ketahanan perbankan.

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan di Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, kliring, inkaso dan lain-lainnya¹. Bank merupakan wadah yang mampu memenuhi kebutuhan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana maupun pihak-pihak yang kekurangan dana dalam kegiatan usaha ataupun sektor lainnya. Dengan kata lain, keberadaan perbankan sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan yang dimaksudkan dalam UU RI No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pentingnya kontribusi lembaga perbankan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga mampu menciptakan suatu keadaan dalam perekonomian yang kondusif. Besarnya

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 38

peningkatan dalam peredaran uang, menjadikan perbankan menjadi sangat strategis dalam dunia perdagangan dan pembangunan, karena berkaitan dengan penyediaan modal dalam usaha yang dilakukan oleh masyarakat ataupun dalam pemenuhan kebutuhan (konsumtif). Oleh karena itu, bank memiliki peran yang strategis dalam perputaran roda perekonomian suatu negara.

Begitu pentingnya keberadaan perbankan, sehingga kestabilan akan ketahanan perbankan harus selalu diawasi. Ketika ketahanan perbankan mulai goyah, maka akan mengganggu aktivitas-aktivitas sekitarnya bahkan dapat mengganggu sistem perekonomian negara. Seperti krisis yang pernah terjadi di tahun 1997/1998 pun, menyebabkan beberapa bank harus ditutup karena tidak mampu mengelola penyaluran dana dengan baik. Beberapa kasus buruknya pengelolaan penyaluran dana oleh perbankan di Indonesia antara lain adalah kredit macet yang terjadi pada Bank Bapindo di tahun 1994. Dalam sejarah perbankan mensalurkan kredit terbesar senilai Rp. 1,3 triliun kepada Golden Key Group. Kasus pemberian kredit yang tidak sehat dan sangat erat dengan tindak korupsi yang tidak pernah terselesaikan. Kemudian ada Bank Summa yang kemudian dilikuidasi oleh pemerintah pada tahun 1992. Dari total kredit yang disalurkan sebanyak Rp. 1,5 triliun, Rp. 1 triliun tergolong macet.² Selain itu juga terjadi pada Bank Jatim yang merupakan bank milik pemerintah, memiliki tingkat gagal bayar untuk tahun 2013 mencapai 3,25 persen dari debitur. Persentase tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,96 persen, dan kenaikan kredit macet tersebut berasal dari kredit sektor riil yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR).³

Keberadaan bank akan menjadi tidak efektif ketika adanya ketidakseimbangan dalam penghimpunan dana dengan penyaluran dana bank. Pada saat bank menghimpun dana dari masyarakat dengan jumlah yang besar tetapi tidak dibarengi

² Hedy Herijanto, *Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h. xxxvii

³ Nurul Arifin, "Banyak Kredit Macet, Bank Jatim Kurangi Penyaluran KUR", dalam <http://economy.okezone.com/read/2013/03/07/457/772636/banyak-kredit-macet-bank-jatim-kurangi-penyaluran-kur> Posted 07 Maret 2013

dengan penyaluran dana yang sama dengan tetap menjaga tingkat likuiditas bank, maka kinerja bank akan dinilai buruk dari sisi bank sebagai lembaga intermediasi.

Kegiatan utama bank dalam penyaluran dana akan menyebabkan suatu risiko bagi bank, yakni timbulnya pembiayaan bermasalah. Ketika penyaluran dana bank yang besar tetapi dalam pengelolaannya tidak dijalankan dengan baik, terutama dalam penilaian kelayakan nasabah yang menerima dana, maka akan mengakibatkan adanya kemungkinan tidak kembalinya dana tersebut. Sedangkan dari sisi lain, bank harus mengembalikan dana yang dihimpun dari masyarakat ketika masyarakat ingin menariknya kembali dan ini akan menimbulkan besarnya risiko kegagalan bank pada saat bank tidak mampu memenuhinya.

Tabel 1.
Data Perkembangan Jumlah Bank Umum Konvensional
dan Bank Umum Syariah di Indonesia⁴
(data diolah)

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Konvensional	130	124	121	122	120	120	120	120	119	118
Kantor BUK	9.680	10.868	12.837	1.706	1.669	1.653	29.945	31.847	32.739	32.949
Bank Umum Syariah	3	5	6	11	11	11	11	12	12	13
Kantor BUS	398	576	711	1.215	1.390	1.734	1.987	2.163	1.990	1.869

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai tahun 2016 jumlah bank umum untuk bank konvensional 118 dengan jumlah kantor 32.949. Sedangkan untuk bank umum syariah, jika kita lihat dari 2007 masih berjumlah 3 dan hingga 2006 sudah bertambah menjadi 13. Pasca krisis, jumlah bank umum syariah justru malah bertambah di dibandingkan dengan bank umum konvensional. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah mulai diakui serta diterima di masyarakat Indonesia dan diharapkan

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Januari 2017*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2017)

dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional.

Di tahun 2017 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai industri perbankan nasional tetap akan menghadapi sejumlah risiko dalam penyaluran dana. Risiko ini meningkat dikarenakan lambatnya penyaluran dana yang diberikan oleh perbankan. Bank Indonesia dalam hasil survey perbankan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit di kuartal I 2017 masih mengalami kelambatan. Melambatnya pertumbuhan dalam penyaluran dana ini juga terjadi di tahun 2016. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hingga Januari 2017 tumbuh sebesar 10,4 % jika dibandingkan secara tahunan.⁵ Namun jika dilihat dari kondisi perekonomian yang membaik, diprediksi akan meningkat kembali pada kuartal II 2017.⁶ Persentase NPF masih tergolong tinggi dibanding perbankan konvensional. Ini akibat economic scale masih rendah dan juga terpengaruh pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi meningkatkan NPF.⁷

Kegagalan untuk menjaga ketahanan bank dalam penyaluran dana ke masyarakat, pernah menjadi fenomena yang mendunia. Di antaranya krisis perbankan yang pernah terjadi di Norwegia tahun 1993, Bulgaria tahun 1990-an, Sub-Sahara Afrika (Kenya, Higeria, Uganda, Zambia) tahun 1990-an, Paraguay di tahun 1989, Meksiko di tahun 1994-1995, Cina 200-2001, Amerika 2008, Indoensia 1997 dan di beberapa negara lainnya. Penyebab runtuhnya bank di beberapa negara tersebut disebabkan tingginya risiko penyaluran dana atau besarnya nilai

⁵ Sakina Rakhma Diah Setiwan, "Risiko Kredit Bermasalah Mengintai Perbankan", dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/23/170835326/risiko.kredit.bermasalah.mengintai.perbankan> Posted 23 Maret 2017

⁶ Sakina Rakhma Diah Setiwan, "Kuartal I 2017, Pertumbuhan Kredit Masih Melambat", dalam <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/13/193000026/kuartal.i.2017.pertumbuhan.kredit.masih.melambat> Posted 13 April 2017

⁷ Idris Rusadi Putra, "OJK sebut ketahanan bank syariah membaik seiring kenaikan modal", dalam <https://www.merdeka.com/uang/ojk-sebut-ketahanan-bank-syariah-membaik-seiring-kenaikan-modal.html>__Posted 15 Juni 2017

Non Performing Loan (NPL).⁸

Betapa pentingnya dalam menjaga ketahanan bank dalam penyaluran dana agar stabilitas perbankan hingga sistem keuangan negara terjamin, disertai fenomena *dual banking system* yang ada di Indonesia menjadi alasan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang ketahanan bank dalam penyaluran dana pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia.

Kerangka Teori

Lembaga perbankan di Indonesia memiliki peran penting untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, bank sangat berperan terhadap perputaran roda perekonomian bagi masyarakat. Ketika bank tidak menjalankan kegiatan operasional dengan kinerja yang baik, maka akan menyebabkan kegagalan suatu bank tersebut. Runtuhnya lembaga perbankan secara masiv, dapat menyebabkan rusaknya sistem keuangan di dalam suatu negara. Hal tersebut dapat berujung pada terjadinya krisis keuangan bisa menjalar ke bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, dan lainnya.

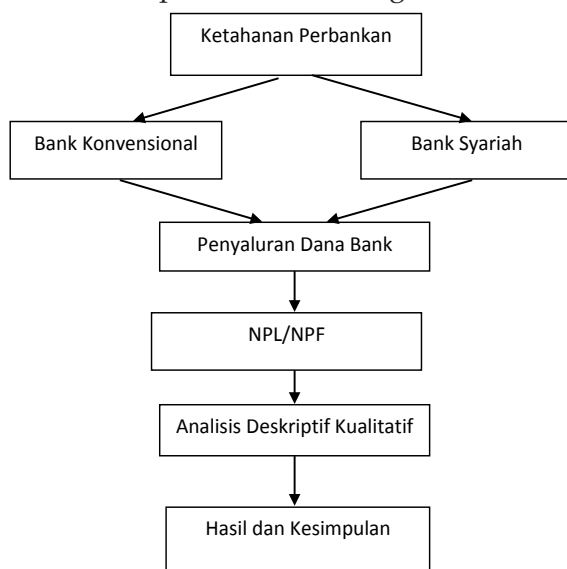
Di Indonesia, sistem perbankan menjalankan *dual-banking system* yakni bank konvensional dan bank syariah. Munculnya bank syariah di Indonesia, bukan hanya dikarenakan negara Indonesia yang mayoritas muslim tetapi lebih kepada keraguan yang mulai muncul di kalangan masyarakat dunia terhadap sistem konvensional yang selama ini telah berjalan. Sistem konvensional yang digunakan selama ini di dalam perbankan, memiliki catatan buruk pada setiap negara karena dianggap sebagai biang krisis atau faktor utama dalam terjadinya krisis suatu negara.

Ketahanan perbankan dapat dilihat dari beberapa sisi, salah satunya dari sisi ketahanan penyaluran dana yang dilakukan oleh kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh perbankan, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Ketahanan dalam

⁸ Hendy Herijanto, h. 6

penyaluran dana tersebut, dapat dilihat dari persentase *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional atau *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah. *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara jumlah kredit/ pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah penyaluran dana yang dilakukan oleh bank.

Dari persentase NPL/NPF akan terlihat kemampuan bank dalam menjalankan operasional utama menyalurkan dana kepada masyarakat pada saat terjadi peningkatan kredit/ pembiayaan bermasalah. Ketika NPL/NPF rendah diindikasikan bahwa ketahanan dalam penyaluran dana oleh bank juga rendah begitupun ketika NPL/NPF tinggi maka diindikasikan bahwa ketahanan dalam penyaluran dana bank juga tinggi. Jika bank tidak dalam kondisi yang baik, maka akan berpengaruh terhadap ketahanan bank itu sendiri yang akan mengakibatkan kegagalan bank. Oleh karena itu, sangat penting dalam mengawasi ketahanan penyaluran dana baik untuk bank konvensional maupun bank syariah. Dari pemikiran tersebut maka dapat digambarkan kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Teori

Kajian Pustaka

1. Perbankan di Indonesia

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹ Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem yang digunakan dalam menjalan operasional perbankan yakni sistem konvensional dan sistem syariah. Perbedaan antara bank yang menggunakan sistem konvensional dengan bank yang menggunakan sistem syariah, salah satunya dan yang terpenting terletak pada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Jika bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam aktivitas operasionalnya, maka di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Konsep penghimpunan dan penyaluran dana bank konvensional berdasar pada prinsip pinjam-meminjam. Konsep seperti ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Pinjaman dengan pengembalian yang berlebih sudah termasuk ke dalam riba sehingga konsep seperti ini diharamkan dalam pelaksanaannya dan tidak dapat digunakan di dalam bank syariah. Hal jelas tersirat di dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁰ Sedangkan bank syariah memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan aktivitas operasional yang tentunya dihalalkan dan sesuai dengan pedoman dasar dalam hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadits/s.

Munculnya beberapa bank syariah pada belakangan ini, didasari oleh timbulnya keraguan akan sistem bunga pada bank konvensional, selain diharamkan dalam Islam, juga dinilai tidak membawakemaslahatan bagi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan di dalam operasional perbankan adalah jual beli, modal usaha/ investasi, sewa-menyewa, dan jasa

⁹ Kasmir, h. 24

¹⁰ QS. Al-Baqarah ayat 275

bank lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Perbedaan operasional bank konvensional dan bank syariah dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

Misalkan nasabah yang ingin mengajukan kredit melalui bank konvensional, maka nasabah harus mengembalikan kredit tersebut sama dengan jumlah yang dipinjam dengan ditambah bunga yang telah ditentukan bank di awal. Begitupun ketika ada nasabah yang ingin menabungkan dananya di bank konvensional, maka bank konvensional wajib mengembalikan dana nasabah ditambahkan dengan bunga yang telah ditetapkan bank. Di bank syariah, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, harus menyesuaikan dengan prinsip apa pembiayaan tersebut dapat dicairkan apakah dengan jual beli, modal usaha, sewa menyewa, ataupun prinsip lainnya. Hal ini bisa dikonsultasikan langsung dengan bank ataupun bisa ditetapkan sendiri oleh nasabah yang bersangkutan jika nasabah masih kesulitan dalam mengenali transaksi-transaksi pada bank syariah. Jika digunakan prinsip jual beli, maka bank akan mendapatkan keuntungan (margin) dari hasil jual beli tersebut. Jika menggunakan prinsip modal kerja, maka bank akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan (dihitung dari *gross profit*/laba kotor). Jika digunakan prinsip sewa-menyewa, maka bank akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan sewa-menyewa tersebut. Dari semua prinsip yang dapat digunakan di dalam bank syariah tersebut, harus jelas disepakati di awal begitu juga dengan nilai pembiayaan beserta keuntungan yang akan didapatkan oleh bank.

Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa di dalam menjalankan kegiatan operasional bank syariah, sangat erat kaitannya dengan sektor riil sehingga fungsi perbankan sebagai penggerak roda perekonomian lebih terlihat jelas di dalam bank syariah. Tidak bisa dipungkiri bahwa bank konvensional juga memiliki peran yang sama dalam menggerakkan roda perekonomian, tetapi jika dilihat secara teknisnya bank

¹¹ *Kasmir, h. 168*

konvensional lebih terlihat bias dibandingkan dengan bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun faktanya, dari semua bank syariah yang ada di Indonesia belum bisa menjalankan aktivitasnya yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah di karenakan keterbatasan yang dimiliki bank syariah yang salah satunya adalah keberadaan sumber daya manusianya yang masih minim.

Biasanya manajemen pengelola di dalam bank syariah masih banyak yang berasal dari bank konvensional. Sehingga ini menjadi dilema bagi perkembangan bank syariah. Belum lagi penilaian masyarakat terhadap bank syariah yang melihat bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Padahal dengan adanya bank syariah, besar harapan ke depan agar kesejahteraan masyarakat dapat merata baik Indonesia maupun dunia.

2. Ketahanan Perbankan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketahanan yang berdasar dari kata tahan memiliki arti tetap keadaannya (kedudukannya dan sebagainya) meskipun mengalami berbagai-bagai hal, tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur, dan sebagainya), kuat atau sanggup menderita (menanggung) sesuatu, dapat menyabarkan (menguasai) diri. Sedangkan ketahanan memiliki arti tahan (kuat); kekuatan (hati, fisik), dan atau daya tahan. Oleh karena itu ketahanan perbankan dapat diartikan sebagai kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan sistem perbankan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan sistem perbankan.¹²

Menurut Berry et al mendefinisikan bahwa ketahanan dalam sektor perbankan merupakan suatu kondisi dimana individual bank mampu menahan guncangan dari berbagai sumber, baik dari internal perbankan maupun dari eksternal perbankan. Ketika timbul gejala guncangan, maka perbankan akan mampu menyesuaikan atau menyerap risiko atau merespon

¹² <https://kbbi.web.id/>

dengan cepat setiap guncangan yang muncul, sehingga perbankan mampu mengantisipasi secara dini berbagai potensi guncangan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan.¹³ Di sisi lainnya, Bank Indonesia (2010) menjelaskan bahwa mengingat pentingnya ketahanan sektor perbankan bagi Indonesia dikarenakan sektor ini menjadi salah satu sektor utama yang berperan dalam menjalankan perekonomian Indonesia dan mayoritas pangsa pasar lembaga keuangan di Indonesia didominasi oleh sektor perbankan. Peningkatan ketahanan sistem perbankan melalui penguatan pengaturan, pemantapan sistem pengawasan bank, penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia, serta pendalaman pasar keuangan.¹⁴

Ketahanan perbankan dapat ditinjau dari beberapa aspek, yang salah satunya dengan melihat dari kualitas penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Penyaluran dana yang dikelola oleh bank kepada masyarakat akan dikembalikan lagi dengan jangka waktu tertentu dan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh bank. Ketahanan bank dari sisi penyaluran dananya bisa dilihat dari besarnya persentase *Non Performing Loan (NPL)* pada bank konvensional atau *Non Performing Financing (NPF)* pada bank syariah. Ketika terjadi penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat, maka kemungkinan di masa yang akan datang muncul kredit/pembiayaan bermasalah.

Dalam memberikan kredit maupun pembiayaan kepada masyarakat, bank harus mampu menilai kelayakan nasabahnya secara tepat.¹⁵ Apabila nasabah yang menerima dana tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam mengembalikan dana tersebut

¹³ Sumandi, *Analisis sistem deteksi dini ketahanan perbankan syariah di Indonesia*, di kutip Berry, Christine, Josh Ryan-Collins and Tony Greenham. 2015. *Financial System Resilience Index Building a strong financial system*. New Economics Foundation. (Yogyakarta : UMY , 2017). h. 24

¹⁴ <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jambi/Documents/23425d3cf03245b880b18f5f70598a87-BOKS1-MENATA-DAN-MEMPERKUAT-PERBANKAN-INDONESIA-MENYONGS.pdf>

¹⁵ Menilai kelayakan nasabah yang menerima kredit ataupun pembiayaan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Prinsip 5 C antara lain *Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*. Sedangkan prinsip 7 P yakni *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*. Lihat Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 95

dengan baik, misalnya pembayaran yang tidak tepat waktu hingga bisa dikatakan masuk ke dalam kategori macet, maka akan mengakibatkan NPL/NPF bank mengalami kenaikan. Terutama jika penyaluran dana bank pada saat yang sama tidak mampu dilakukan secara maksimal karena bank kekurangan likuiditas ataupun minimnya modal bank.

Persentase NPL/NPF yang terlalu tinggi, jika tidak didukung dengan adanya modal yang mencukupi atau likuiditas bank yang baik serta kinerja bank yang buruk dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga (DPK) maka akan menyebabkan bank tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat yang ingin menarik dananya kembali. Hal ini dapat menimbulkan *bank runs* dan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank akan menurun bahkan hilang. Bukan hanya itu saja, dampak tersebut bisa memberikan efek domino terhadap sistem keuangan secara masiv. Dalam banyak kasus, khususnya perbankan konvensional, posisi bank yang memiliki NPL tinggi dapat berakibat kegagalan yang kemudian cenderung diikuti penutupan bank tersebut. Sistem perbankan yang sangat berkaitan satu dengan yang lain, akan menyebabkan terjadinya krisis perbankan dan mengakibatkan efek domino terhadap perekonomian. Oleh karena itu, tingkat NPL/NPF pada bank mampu memberikan informasi serta mengantisipasi lebih awal agar ketahanan perbankan dan sistem keuangan negara bisa terjaga.

Kajian yang dilakukan oleh Siti Aisyah et al dalam menganalisis kestabilan bank-bank Islam di Malaysia ada beberapa yang cenderung stabil dan ada juga yang tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari kecukupan modal bank, pengembalian aset produktif, dan kapasitas modal bank dalam menampung kerugian dari pembiayaan yang tidak terbayarkan. Bank-bank Islam belum bisa mencapai tahap kestabilan yang tinggi dalam bersaing dengan bank konvensional.¹⁶ Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah telah memberikan kontribusi yang penting bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan

¹⁶ Siti Aisyah Hashim, dkk. *Analisis Petunjuk Kestabilan Bank-Bank Islam Melalui Nilai-Nilai Etika*. (Prosiding Perkem VII, Jilid I, 2012). H. 556

fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Peran lain yang kini dituntut dari perbankan syariah adalah mempraktekkan prinsip syariah, khususnya prinsip bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya.¹⁷

Dalam penelitian Candra Setiawan dan Monita Eggy Putri, NPF lebih dipengaruhi variabel internal jika dibandingkan dengan variabel eksternal. Pembiayaan yang bermasalah umumnya disebabkan oleh manajemen yang buruk terjadi. Ketika efisiensi yang rendah menyebabkan adanya kecenderungan manajemen lalai dalam melakukan penilaian jaminan, pemantauan dan pengendalian sistem atas kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sehingga pada saat rendahnya sistem manajemen bank dalam pengelolaan pembiayaan dapat menyebabkan ketahanan bank syariah lemah.¹⁸

Sedangkan hasil penelitian dari Ihda A Faiz, NPF bank syariah dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah pembiayaan dan tingkat PDB. Sedangkan indikator makroekonomi tidak berpengaruh terhadap NPF bank. Di sisi lain NPL sangat bergantung pada bunga dan sektor keuangan. Hal ini menggambarkan stabilitas bank syariah serta keunggulan sistem kerja dan produk yang ditawarkan dibandingkan bank konvensional. Berbagai jenis dan model krisis keuangan pun tidak akan menjangkiti perekonomian yang dibangun berdasarkan ketentuan Islam. Dari sisi makro ekonomi menunjukkan kecilnya porsi model perekonomian Islam dalam penciptaan krisis keuangan global yang pernah terjadi. Sedangkan dari sisi mikronya, hasil penelitian ini memperkuat karakter ketahanan model bisnis Islam dan watak kemandirian yang diciptakannya di banding dengan sistem saat ini.¹⁹

¹⁷ Yuli Andriansyah, *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional*. (La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III No. 2 Desember 2009). H. 181

¹⁸ Candra Setiawan dan Eggy Putri. *Non-Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia*. (Journal of Islamic Finance and Business Research Vol. 2. No. 1. September 2013). H.58

¹⁹ A Ihda Faiz. *Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global*. (La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV No 2, Desember 2010). H. 217

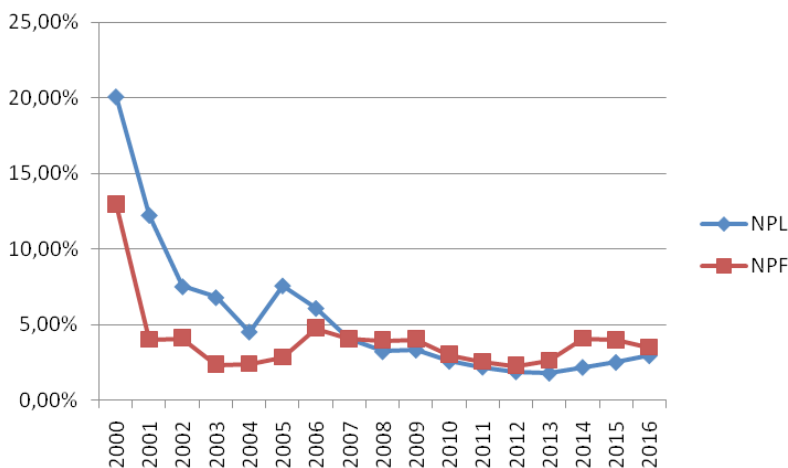
Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Yang dimaksud deskriptif kualitatif disini adalah suatu metode dalam mencari fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat dengan memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.²⁰ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptifkan tentang ketahanan bank dengan membandingkan antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dilihat dari perkembangan NPL dan NPF dari tahun 2000-2016.

Hasil Penelitian

Ketahanan perbankan dari penyaluran dana yang telah dilakukan oleh bank, dapat dilihat berdasarkan persentase dari NPL untuk bank konvensional dan NPF untuk bank syariah. Persentase NPL/NPF dapat menunjukkan keadaan bank yang sebenarnya dalam pengelolaan penyaluran dananya kepada masyarakat. Artinya, tidak hanya dari segi penyaluran dananya saja tetapi juga terlihat bagaimana kualitas penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Ketika penyaluran dana yang bermasalah tinggi pada suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, maka bank akan mengalami likuiditas yang rendah karena pengembalian atas dana-dana yang telah disalurkan oleh bank juga rendah. Tetapi ketika penyaluran dana yang bermasalah mengalami peningkatan, di sisi lain bank tetap mampu untuk menyediakan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dengan keadaan yang seperti itu, bisa dikatakan bank memiliki ketahanan yang cukup baik dalam penyaluran dana kepada masyarakat.

²⁰ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 31



**Gambar 2. Perkembangan NPL dan NPF 2000-2016
(data diolah)**

Grafik diatas merupakan olahan data yang diambil dari OJK dari tahun 2000-2016. Selama 16 tahun terakhir atau beberapa tahun pasca terjadi krisis yang melanda di Indonesia di tahun 1997-1998. Dapat kita lihat, dampak akibat krisis masih mempengaruhi terhadap ketahanan perbankan dari sisi penyaluran dana, baik bank konvensional dan bank syariah. Persentase NPL pada bank konvensional dan NPF pada bank syariah masih tinggi di akhir tahun 2000, walaupun sudah mengalami penurunan di tahun 2001. Namun bagi bank konvensional, ketahanan bank masih belum stabil karena NPL masih cenderung tinggi di atas 5%. Walaupun sempat berada di bawah 5 % sebesar 4,5 % pada tahun 2004, namun di tahun berikutnya kembali naik di angka 7,56 % dan perlahan menurun di tahun berikutnya.

Jika kita lihat pada grafik, NPL pada konvensional memiliki kecenderungan meningkat di tahun 2000 dan 2005. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2000 merupakan tahun di mana Indonesia baru melewati masa krisisnya yang terjadi di tahun 1998. Bahkan setelah tahun 2000 NPL bank konvensional

masih cenderung tinggi walaupun perlahan mulai menurun. Kembali meningkatnya NPL di tahun 2005 juga dikarenakan situasi perekonomian di Indonesia yang mulai menurun di akibatkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Terjadinya peningkatan risiko kredit seiring dengan kenaikan suku bunga dan risiko sektor riil. Depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga BBM memicu peningkatan inflasi yang signifikan. Bahkan BI telah memperkirakan laju inflasi pada tahun 2005 hingga mencapai 18%.²¹

Sedangkan untuk NPF, pasca krisis yang terjadi di tahun 1998 masih memberikan dampak yang kuat terhadap meningkatnya NPF di tahun 2000. Ini dikarenakan meskipun NPF tidak terpengaruh langsung oleh terjadinya krisis yang terjadi di 1998, namun tidak dapat dipungkiri bahwa krisis tersebut berdampak pada kegiatan usaha dan pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat yang memiliki kewajiban dalam membayar angsuran akan kesulitan membayar karena menurunnya produktifitas kegiatan usaha mereka yang akan berpengaruh terhadap penghasilan mereka.

Seperti yang terjadi di tahun 2006, NPL cenderung menurun sedangkan NPF cenderung naik meskipun tidak melewati 5%. Yang berarti krisis tahun 2005 tidak secara langsung mempengaruhi kenaikan NPF yang baru terjadi di tahun 2006. Ada kemungkinan masyarakat yang mengalami penurunan dalam penghasilan mereka tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan oleh bank.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah mengaitkan beberapa faktor yang mempengaruhi NPL/NPF, kemudian dikelompokkan faktor-faktor tersebut ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya timbul dari adanya aktivitas perbankan. Tugas dan fungsi manajemen dapat tercermin dari baik atau buruknya kinerja perbankan. Apabila bank memiliki kinerja yang baik,

²¹ Biro Humas, *Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*, dalam <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp%20710405.aspx>, Posted 06 Desember 2005

maka persentase NPL/NPF akan cenderung rendah dan ketahanan bank pun akan terjaga. Untuk faktor eksternal biasanya timbul dari luar bank, yang akan tampak pada kondisi ekonomi nasional beserta dampaknya terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat NPL/NPF suatu bank dan akan berdampak pula pada ketahanan suatu bank.

Pada dasarnya, faktor internal maupun faktor eksternal memiliki peranan yang sama dalam menguji ketahanan perbankan. Tapi jika dilihat dari hasil oleh data yang dilakukan, pada saat terjadi krisis di tahun 2005 NPF tidak terpengaruh secara langsung yang artinya ketidakstabilan perekonomian pada saat itu, yang menjadi faktor eksternal dari perbankan, tidak berdampak langsung kepada ketahanan bank syariah. Sedangkan NPL bank konvensional langsung meningkat di tahun 2005, yang berarti faktor eksternal memiliki peran yang penting dalam menurunkan ketahanan bank konvensional.

Perbedaan yang mendasar atas konsep yang digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah adalah dalam hal pembagian keuntungannya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang erat kaitannya dengan riba. Sedangkan riba sangat dilarang dalam Islam dan tidak sesuai dengan nilai-nilai maqosid syariah. Bank syariah lebih dikenal dengan prinsip bagi hasilnya, walaupun sistem yang digunakan bank syariah tidak hanya bagi hasil tetapi juga margin yang didapat dari kegiatan jual beli dan upah sewa yang didapat dari kegiatan sewa-menyewa. Perbedaan konsep lainnya antara bank konvensional dan bank syariah yang menyebabkan unggulnya bank syariah dalam menjaga ketahanannya adalah sebagai berikut.

1. Bunga menciptakan inflasi

Dalam sistem keuangan di dunia saat ini, uang dan bunga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ahmed Kameel Mydin Meera dari International Islamic University Malaysia, menjelaskan bunga sebagai berikut : jika diasumsikan terdapat uang yang beredar (money supply) dalam bentuk pinjaman sebanyak Rp. 100 miliar, dan diberikan bunga 10 % atau Rp. 10 miliar, bukan berarti bahwa jumlah Rp. 10 miliar sebagai

bunga telah ada dalam sistem keuangan atau masyarakat. dari segi pemerintah, tambahan uang untuk bunga ini perlu dicetak, kemudian disalurkan ke sistem. Secara tidak langsung, bunga yang berkembang di masyarakat akan mengakibatkan inflasi jika masyarakat tidak mampu memproduksi barang dan jasa di saat yang bersamaan.²²

2. Risk Sharing bukan risk transfer

Bank konvensional dikenal dengan sistem bunganya, bank syariah dikenal dengan prinsip bagi hasilnya. Sebenarnya dalam mekanisme perhitungannya, keduanya menggunakan model persentase. Hanya saja nilai dasar yang digunakan dalam menghitung persentasenya lah yang berbeda. Sistem bunga dalam mekanisme perhitungannya menggunakan modal pokok. Artinya persentase dikalikan dengan modal pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang sifatnya tetap karena modal pokok pinjaman pun akan sama (sistem flat), tidak disertai dengan bagaimana kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Jalan tidaknya usaha nasabah tidak mempengaruhi seberapa besar kompensasi yang harus diberikan kepada bank, sehingga akan memberatkan nasabah dalam membayar bunga kepada bank jika usahanya dalam keadaan yang tidak baik.

Untuk sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah, berdasar dari laba kotor (*gross profit*) yang dihasilkan dari kegiatan usaha nasabah. Kompensasi yang didapat dari kedua belah pihak bergantung kepada nisbah yang di sepakati di awal akad. Oleh karena itu, keuntungan yang didapat keduanya dirasa lebih adil ketika menggunakan metode perhitungan bagi hasil. Di sinilah letak perbedaan bank konvensional dengan bank syariah.

Bank konvensional cenderung mentransfer risiko kepada nasabah agar nasabah tetap membayar bunga tiap bulan sesuai dengan jumlah pinjamannya beserta pinjamannya dan bank syariah sistem bagi hasil yang digunakan terkesan lebih adil karena bank melihat kemampuan dari nasabah dalam membayar modal maupun bagi hasilnya. Karena apabila terjadi kerugian

²² Hendy Herijanto, h. 233

maka seharusnya modal bank tersebut akan tergerus akibat menanggung kerugian yang dialami. Hanya saja sistem seperti ini sangat rentan terhadap terjadinya manipulasi laporan hasil kegiatan usaha oleh nasabah. Sehingga dampak kerugiannya akan menjadi lebih besar dan harus ditanggung oleh bank syariah. Oleh karenanya, bank syariah harus meningkatkan kemampuan dalam menilai kelayakan nasabah dan usaha yang akan dilakukan oleh nasabah sehingga akan lebih efektif dan terhindar dari terjadinya *asymetri information* dan *indikasi moral hazard*.

3. Lebih dekat dengan sektor riil

Pada dasar kegiatan operasional yang dilakukan dalam menyalurkan dana ke masyarakat oleh bank syariah tidak menggunakan istilah kredit seperti halnya pada bank konvensional. Istilah penyaluran dana pada bank syariah lebih dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan di sini berarti bank syariah menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu, konsep sebenarnya yang digunakan oleh bank syariah adalah mendanai sejumlah kebutuhan masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Apabila akad yang digunakan berupa akad jual beli, maka bank syariah seharusnya bertransaksi selayaknya orang yang melakukan jual beli dan memenuhi rukun jual beli yakni adanya penjual, pembeli, objek yang dijual, dan ijab qobul.

Apabila akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah untuk kegiatan usaha yang berarti masyarakat membutuhkan pendanaan sebagai modal kerja, sudah pasti hal ini berkaitan langsung dengan sektor riil sehingga azas kepercayaan sangat penting dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan sewa menyewa, yang berarti bank harus menyediakan barang ataupun jasa agar bisa digunakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang melakukan kegiatan penyaluran dana dengan sistem kredit atau pinjaman. Yang berarti bahwa bank konvensional hanya memberikan sejumlah uang tunai sesuai dengan persetujuan pihak bank yang berdasar dari pengajuan yang dilakukan oleh nasabah. Meskipun

dalam peruntukannya tetap sama, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat produktif maupun konsumtif, tetapi adanya unsur ketidakjelasan sehingga menyebabkan operasional bank konvensional tidak melekat erat pada sektor riil.

Pentingnya sektor riil sebagai dasar dari kegiatan perbankan, akan sangat membantu bank dalam melaksanakan fungsi dan tujuan dalam menggerakkan perekonomian, khususnya di Indonesia, sehingga akan terhindar dari kegagalan bank hingga munculnya krisis keuangan dan ekonomi. Yang terpenting adalah kemaslahatan dalam masyarakat akan terwujud.

Simpulan

Ketahanan perbankan dalam penyaluran dana bagi bank konvensional di Indonesia mengalami penurunan pada saat pasca krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan krisis yang terjadi pada tahun 2005. Sedangkan untuk bank syariah di Indonesia cenderung stabil pasca krisis 1997-1998. Hanya saja di tahun 2006 ketahanan bank syariah sedikit terganggu dengan krisis yang terjadi di tahun 2005. Hal itu disebabkan krisis 2005 mempengaruhi kegiatan usaha dan pendapatan masyarakat sehingga dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran (modal pokok ditambah dengan bagi hasil) kepada bank ikut menurun. Bank konvensional lebih rentan mengalami penurunan dalam ketahanannya saat terjadi krisis sedangkan bank syariah cenderung stabil meskipun tetap terganggu akibat melemahnya sektor riil akibat krisis.

Daftar Pustaka

Andriansyah, Yuli. *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional*. (La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III No. 2 Desember 2009).

Bank Indonesia, 2010, *Menata dan Memperkuat Perbankan Indonesia*, dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jambi/Documents/23425d3cf03245b880b18f5f70598a87-BOKS1-MENATA-DAN-MEMPERKUAT-PERBANKAN-INDONESIA-MENYONGS.pdf>

- Biro Humas, *Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*, dalam <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp%20710405.aspx>, Posted 06 Desember 2005
- Faiz, A Ihda. *Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global*. (La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV No 2, Desember 2010).
- Hashim, Siti Aisyah, dkk. *Analisis Petunjuk Kestabilan Bank-Bank Islam Melalui Nilai-Nilai Etika*. (Prosiding Perkem VII, Jilid I, 2012)
- Herijanto, Hendy. *Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2013)
- Idris Rusadi Putra, "OJK sebut ketahanan bank syariah membaik seiring kenaikan modal", dalam <https://www.merdeka.com/uang/ojk-sebut-ketahanan-bank-syariah-membaik-seiring-kenaikan-modal.html> Posted 15 Juni 2017
- Kasmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Nurul Arifin, "Banyak Kredit Macet, Bank Jatim Kurangi Penyaluran KUR", dalam <http://economy.okezone.com/read/2013/03/07/457/772636/banyak-kredit-macet-bank-jatim-kurangi-penyialuran-kur> Posted 07 Maret 2013
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Januari 2017*, (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2017)
- Sakina Rakhma Diah Setiwan, " Kuartal I 2017, Pertumbuhan Kredit Masih Melambat", dalam <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/13/193000026/kuartal.i.2017.pertumbuhan.kredit.masih.melambat> Posted 13 April 2017
- Sakina Rakhma Diah Setiwan, "Risiko Kredit Bermasalah Mengintai Perbankan", dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/23/170835326/risiko.kredit.bermasalah.mengintai.perbankan> Posted 23 Maret 2017

Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Setiawan, Candra dan Eggy Putri. *Non-Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia*. (Journal of Islamic Finance and Business Research Vol. 2. No. 1. September 2013).

Sumandi, *Analisis sistem deteksi dini ketahanan perbankan syariah di Indonesia*, di kutip Berry, Christine, Josh Ryan-Collins and Tony Greenham. 2015. *Financial System Resilience Index Building a strong financial system*. New Economics Foundation. (Yogyakarta: UMY, 2017).

<https://kbbi.web.id/>